

|  |
| --- |
| RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS  BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  TAHUN2023-2026 |
|  |
| **January** 23**2023**  Pemerintah Kabupaten Barito Kuala  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Jalan Jend. Sudirman No. RT.13.Telp/Fax (0511)4799543 |

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil’alamin, hanya kepada Allah SWT kami bersyukur, karena atas perkenanNya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Renstra BPKAD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 ini selesai dalam penyusunannya.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala ini merupakan bagian dari RPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 – 2026 yang mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk 4 (Empat) tahun kedepan.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang turut serta menyumbangkan pemikiran dan ide guna memperkaya dokumen perencanaan ini.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 2023-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk 4 (empat) tahun kedepan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala periode 2023-2026, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 disusun sebagai dukungan terhadap keberhasilan Visi Kabupaten Barito Kuala yaitu, “Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala yang Adil Maju dan Mandiri berbasis Agribisnis.

Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau panduan bagi segenap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPKAD Kabupaten Barito Kuala,maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian tujuan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala periode 2023-2026, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Semoga Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 ini dapat memberikaan manfaat.

Marabahan,16 Desember 2024

Kepala BPKAD Kab. BATOLA

WIWIEN MASRURI, SST,P, M.Si

NIP 19830316 200112 1 001

**DAFTAR ISI**

Halaman

KATA PENGANTAR …………………………………………………………... 2

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………. 4

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………. 5

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 6

1.1 Latar Belakang .......................................................................... 6

1.2 Landasan Hukum ...................................................................... 7

1.3 Maksud dan Maksud ................................................................. 9

1.4 Sistimatika Penulisan ................................................................ 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD KABUPATEN BARITO KUALA 11

2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi .................................... 11

2.2 Sumber Daya BPKAD Kabupaten Barito Kuala....................... 14

2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Barito Kuala............... 25

2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

Kabupaten Barito Kuala ........................................................... 27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPKADKABUPATEN

BARITO KUALA ........................................................................... 31

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan BPKAD Kabupaten Barito Kuala ………………….. 31

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Rencana Pembangunan Daerah ............................................................................................ 32

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan ............................ 34

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis …………......................................................... 36

3.5 Penentuan Isu- isuStrategis ................................................... 36

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KABUPATEN BARITO KUALA. 39

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten

Barito Kuala............................................................................... 39

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BPKAD KABUPATEN

BARITO KUALA ............................................................................. 43

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .. 47

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG……………. 77

BAB VIII PENUTUP ..................................................................................... 79

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah segera menyusun Rencana Strategis SKPD. Renstra SKPD memuat antara lain tentang kedudukan dari setiap SKPD, program/kegiatan apa yang secara garis besar direncanakan serta cara untuk mencapai tujuan itu. Oleh karenanya, Renstra merupakan analisis dan pengambilan keputusan strategistentang masa depan setiap satuan kerja untuk menempatkan dirinya pada masa yang akan datang. Penyusunan rencana strategis organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau RENSTRA BPKAD Kabupaten Barito Kuala adalah sebuah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu dengan Empat tahun periode perencanaan. Di dalam Renstra ini digambarkan dengan jelas tugas dan fungsi serta peran strategis BPKAD Kabupaten Barito Kuala di dalam pembangunan daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis baik internal sistem maupun eksternal organisasi. Renstra BPKAD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026, Renstra juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja atau RENJA SKPD dan menjadi pedoman bagi penilaian kinerja instansi pemerintah oleh lembaga audit baik internal ataupun eksternal.

Renstra ini dibuat berdasarkan kondisi riil organisasi dengan dinamika, permasalahan dan perkembangan yang begitu signifikan. Penyusunan Renstra ini diharapkan mampu untuk menjadi dokumen yang bisa menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Barito Kuala yang selalu berusaha untuk memperbaiki kinerja pelayanan dari hari ke hari.

Renstra disusun sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan RPD yang nantinya akan ditetapkan sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD, yang disusun berdasarkan RENJA SKPD dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Hal ini nantinya akan berdampak pada sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan pada RENJA dengan Rancangan RENSTRA dan RPD dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan prioritas program pembangunan yang berorientasi pada visi dan misi RPD periode 2023-2026.

Setiap SKPD dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan Visi dan Misi RPD. Oleh karena itu RPD Kabupaten merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten khususnya dalam menjalankan agenda Pembangunan yang telah tertuang dalam RPD yang keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renstra SKPD.

**1.2 Landasan Hukum**

Renstra disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Mengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
7. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
8. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Inmendagri 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala nomor 03 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito 2005 – 2025 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06Tahun2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun2012-2031 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026;
14. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

**1.3 Maksud dan Tujuan**

**Maksud** dan Tujuan penyusunan Rancangan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah:

1. Merumuskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2023-2026 dapat tercapai.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan .
5. Menetapkan dokumen keuangan daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
6. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
7. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
   1. **Sistematika Penulisan.**

RencanaStrategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 disusun menurut mengacuPeraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan instruksi Menteri Daalam Negeri Nomomr 70 Tahun 2021 sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud danTujuan
  4. Sistematika Penulisan

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

**DAN ASET DAERAH**

* 1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi
  2. Sumber Daya BPKAD Kabupaten Barito Kuala
  3. KinerjaPelayanan BPKAD Kabupaten Barito Kuala
  4. Tantangan Dan Peluang pengembangan pelayanan BPKAD Kabupaten Barito Kuala

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN**

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

* 1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD Kabupaten Barito Kuala
  2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPD.
  3. Telaahan Renstra K/L
  4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  5. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KABUPATEN BARITO KUALA**

4.1   Tujuan dan Sasaran Jangka menengah BPKAD

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BPKAD**

**BAB II :**

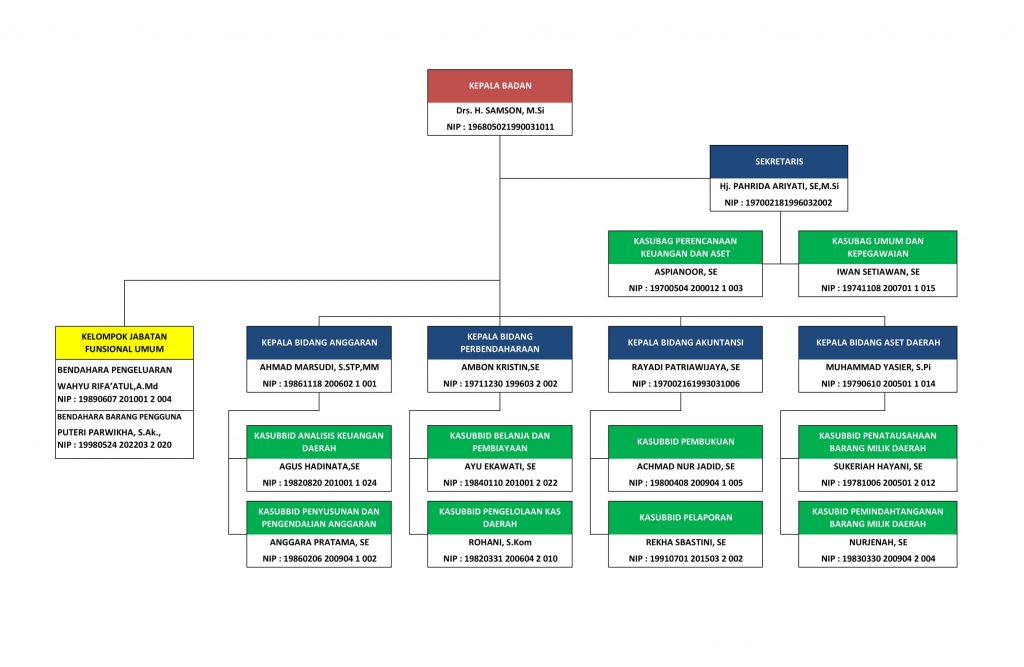
**GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

**DAN ASET DAERAH**

* 1. **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

|  |
| --- |
| Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan lebih lanjut dijabarkan melalui Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.  **2.1.1. Tugas**  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah  **2.1.2. Fungsi**  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:   * 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.   2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkuptugasnya.   3. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkuptugasnya.   2.1.3. Struktur Organisasi  Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah penyetaraan jabatan fusngsional terdiri dari:   * 1. Sekretariat, terdiri dari;      1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, danAset      2. Subbagian Umum danKepegawaian   2. Bidang Anggaran, terdiri dari:      1. Subbidang Analisis KeuanganDaerah      2. Subbidang Penyusunan dan PengendalianAnggaran   3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:      1. Subbidang Belanja danPembiayaan      2. Subbidang Pengelolaan KasDaerah   4. Bidang Akuntansi, terdiri dari:      1. SubbidangPembukuan      2. SubbidangPelaporan   5. Bidang Aset Daerah, terdiri dari:      1. Subbidang Pemindahtanganan Barang MilikDaerah      2. Subbidang Penatausahaan Barang MilikDaerah   6. Unit Pelaksana TeknisDaerah   7. JabatanFungsional |

**Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BPKAD**



**2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

**2.2.1.Sumber Daya Manusia,**

Pada saat ini Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan di BPKAD Kabupaten Barito Kuala berjumlah 29 (Dua puluh Sembilan ) Orang dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam namun sebagian besar adalah Sarjana Ekonomi Manajemen dan beberapa adalah Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, untuk mendukung kinerja Bidang Aset Daerah ditempatkan pula ASN yang memang telah memiliki keahlian khusus di bidang Manajemen Aset. Sistem Kerja di BPKAD menuntut pekerjaan dilakukan dengan cepat dan dengan ketepatan yang tinggi, karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah memiliki tugas dan fungsi yang cukup penting sehingga dokumen-dokumen perencanaan dan hasil rencana serta dokumen penunjang lainnya harus dibuat dengan se-detail mungkin guna menghasilkan kebijakan yang tepat dalam hal pengelolaan keuangan dan juga pengelolaan aset daerah.

Untuk mencapai tujuan organisasi maka seluruh komponen organisasi diarahkan untuk berperan serta secara aktif dalam membangun sistem yang solid, implementasinya adalah selalu bekerjasama dalam tim sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan bersama, tidak mewakili kepentingan orang per orang tapi yang muncul adalah kebijakan yang berasal dari hasil musyawarah tim. Manajemen kerja yang efisien, efektif waktu dan responsif sampai saat ini mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang cukup membantu pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Barito Kuala untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.Hal yang masih harus dilengkapi dan diperbaiki dari segi Sumber Daya Manusia di BPKAD Kabupaten Barito Kuala adalah perlunya disiapkan pemimpin-pemimpin yang lebih mengerti dan piawai dalam memahami liku-liku birokrasi, hal ini berlaku bagi mereka yang menduduki esselonering di BPKAD dari eselon 4 sampai dengan eselon 2. Hal ini *sangat penting sekali* mengingat sebagai instansi yang vital, BPKAD diharapkan mampu membuat kebijakan-kebijakan strategis dalam waktu yang cepat. Bila pemimpin-pemimpin dibekali dengan teknik perumusan strategi yang baik dalam hal pengambilan keputusan di lingkup birokrasi, tentunya hal ini menjadi nilai plus bagi organisasi karena setiap kali dibutuhkan di saat kapanpun, mampu menghasilkan sebuah keputusan ataukebijakan yang berkualitas dan mempunyai jangkauan yang luas serta tidak memiliki resiko hukum karena kebijakan yang diambil sudah dipertimbangkan secara matang dan terukur dengan baik. Tabel 2.2 berikut ini menggambarkan formasi ASN di BPKAD Kabupaten Barito Kuala pada saat ini :

**Tabel 2.2**

**ASN BPKAD menurut Golongan dan Ruang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **Golongan/Ruang** | **Jumlah (org)** |
|  |  |  |
| 1 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
| 2 | Pembina Tingkat I (IV/b) | 1 |
| 3 | Pembina (IV/a) | 3 |
| 4 | Penata Tingkat I (III/d) | 9 |
| 5 | Penata (III/c) | 4 |
| 6 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 3 |
| 7 | Penata Muda (III/a) | 5 |
| 8 | Pengatur Tingkat I (II/d) | 1 |
| 9 | Pengatur (II/c) | 2 |
|  |  |  |
|  | **JUMLAH** | 29 |

*(Data per Januari 2022)*

Selain Aparatur Sipil Negara, tugas-tugas keseharian di BPKAD Kabupaten Barito Kuala juga dibantu oleh beberapa orang tenaga harian lepas yang bertugas sesuai bidangnya, mereka ditempatkan untuk membantu kegiatan administrasi perkantoran, dan cleaning service. Seleksi tenaga harian lepas ini dilaksanakan secara ketat oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam rangka mencari sosok pegawai yang memiliki kapabilitas, rajin dan ahli di bidangnya. Tingginya beban pekerjaan, cepatnya ritme kerja dan kompleksnya permasalahan yang terjadi di BPKAD memerlukan bantuan tenaga administratif untuk mendukung sistem kerja agar tugas pokok dan fungsi BPKAD dapat dilaksanakan dengan baik serta menghasilkan output pekerjaan yang tepat waktu dan berkualitas. Berikut ini adalah Tabel 2.3 yang menggambarkan komposisi ASN di BPKAD berdasarkan pendidikan formal yang dimilikinya :

**Tabel 2.3**

**ASN BPKAD menurut pendidikan formal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** |  | **Tingkat Pendidikan** | **Jumlah (org)** |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1 | S – 3 | (Doctoral) | 0 |
| 2 | S – 2 | (Pasca Sarjana) | 3 |
| 3 | S – 1 | (Sarjana) | 19 |
| 4 | D – 3 (Diploma 3) | | 4 |
| 5 | SLTA | | 3 |
|  |  | **JUMLAH** | 29 |
|  |  |  |  |

(Data Februari 2023)

Ada beberapa ASN di BPKAD Kab. Barito Kuala yang penempatannya tidak begitu sesuai dengan disiplin ilmunya, tidak selaras antara latar belakang pendidikannya dengan bidang kerjanya, hal ini memerlukan analisis lebih lanjut tentang penempatan ASN agar bisa ditempatkan sesuai dengan keahliannya (*right man on the right place*), namun demikian dengan lingkungan kerja yang cukup nyaman di BPKAD diharapkan setiap ASN bisa berinteraksi dengan baik dalam satu hubungan kerja yang harmonis demi mencapai tujuan organisasi. Selain itu untuk lebih memantapkan kinerja ASN maka telah beberapa kali dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang intinya adalah pemahaman tentang implementasi *accrualbasis accounting.* Hal ini dimaksudkan agar ASN dengan berbagai latar belakangpendidikan bisa mengerti dan lebih memahami fungsinya sebagai ASN yang bekerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 2.4 dibawah ini menggambarkan Struktur ASN menurut eselonering di BPKAD Kabupaten Barito Kuala :

**Tabel 2.4**

**ASN BPKAD menurut eselon**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **No.** | **Eselonisasi** | **Jumlah (org)** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Kepala Badan (Eselon II) | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Sekretaris (Eselon III) | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Kepala Bidang (Eselon III) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Kepala Sub Bagian (Eselon IV) | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Kepala Sub Bidang (Eselon IV) | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | **JUMLAH** | **16** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Data per Januari 2022) | |

Eselonering yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala sudah terpenuhi dari 16 (enam belas) Jabatan yang seharusnya.

**Tabel 2.5**

**Data ASN BPKAD Kabupaten Barito Kuala**





**Tabel.2.6.**

**Pegawai Harian lepas BPAKD Kabupaten**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **T.M.T** | **Tempat /Tanggal Lahir** | **Pendidikan** | **Jabatan** | **ket** |
| 1 | Ardiansyah | 01-01-2005 | Marabahan,03-Nov-11982 | SMA | administrasi |  |
| 2 | Siti Khadijah | 07-01-2008 | Marabahan,25-Des-1977 | SMA | administrasi |  |
| 3 | Wardhatul Mahmudah,AMD | 20-05-2008 | Marabahan,01-Mei-1985 | D3 | administrasi |  |
| 4 | Laila,S.Pd | 04-09-2006 | Marabahan,13-Feb-1987 | S1 | administrasi |  |
| 5 | Yogi Pugu Dwi Cahyono,S.M | 03-08-2015 | Sragen,03-Des-1997 | S1 | administrasi |  |
| 6 | Rhema Monica,S.M | 01-09-2017 | Marabahan,24 Agust 1997 | S1 | administrasi |  |
| 7 | Astia Rachmayanti,A.md,Ak | 2 -01- 2020 | Banjarmasin, 20-Maret-1998 | D3 | administrasi |  |
| 8 | M. Al Fazar,SH | 2 -01-2020 | Banjarmasi, 21 Des 1996 | S1 | administrasi |  |
| 9 | Nelly Solehatin,S.M | 01-04-2022 | Pangkalanbun, 29 Sept 1998 | S1 | administrasi |  |
| 11 | Salim,S.Kom | 01-04-2021 | Jambu, 25 November 1995 | S1 | Administrasi |  |
| 12 | Akmad Riadi,S.Kom | 03-01-2022 | Anjir Pasar, 31 Mei 1994 | S1 | Administrasi |  |
| 13 | Supianor | 01-12-2021 | Banjarmasin, 17 Januari 1980 | SMA | Supir |  |
| 14 | Jimmy Octora | 2 -01-2020 | Marabahan,26 mei 1984 | SMA | Tenaga Kebersihan |  |
| 15 | Hifni Yanor | 02-05-2017 | Mekarsari,15-01-1993 | SMK | Tenaga Kebersihan |  |
| 16 | Mahyuni | 02-01-2014 | NTB,02 Februari 1997 | SMP | Penjaga Malam |  |

**2.2.2. Sarana Dan Prasarana**

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan serta program dan kegiatan yang dilaksanakan maka Kantor BPKAD Kabupaten BARITO KUALA dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kenyamanan kerja yang menganut azas ergonomis, menuju pada konsep hemat kertas (*paperless office*) dan ramah lingkungan. Sarana prasarana tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini :

**Tabel 2.7**

**Sarana dan parasarana**

1. Tanah

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JUMLAH | KONDISI | | | KET |
| BAIK | KURANG BAIK | RUSAK |
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 4.840 | B | - |  |  |

2. Peralatan dan Mesin

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JUMLAH | KONDISI | | | KET |
| BAIK | KURANG BAIK | RUSAK |
| 1 | P.C Unit | 14 | B | - |  |  |
| 2 | Lap Top | 16 | B | - | - |  |
| 3 | Note Book | 2 | B | - | - |  |
| 4 | Hard Disk | 23 | B | - | - |  |
| 5 | peralatan mainframe lainnya | 2 | B | - | - |  |
| 6 | Monitor | 3 | B | - | - |  |
| 7 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 32 | B | - | - |  |
| 8 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 4 | B | - | - |  |
| 9 | Peralatan Personal Komputer lainnya | 2 | B | - | - |  |
| 10 | Server | 3 | B | - | - |  |
| 11 | Hub | 1 | B | - | - |  |
| 12 | Alat Tenis Meja | 1 | B | - | - |  |
| 13 | Station Wagon | 3 | B | - | - |  |
| 14 | Pick Up | 1 | B | - | - |  |
| 15 | Sepeda Motor | 20 | B | - | - |  |
| 16 | Scooter | 1 | B | - | - |  |
| 17 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) | 1 | B | - | - |  |
| 18 | Lemari Besi/Metal | 1 | B | - | - |  |
| 19 | Lemari Kayu | 8 | B | - | - |  |
| 20 | Rak Besi | 75 | B | - | - |  |
| 21 | Rak Kayu | 5 | B | - | - |  |
| 22 | Filing Cabinet Besi | 34 | B | - | - |  |
| 23 | Brandkas | 3 | B | - | - |  |
| 24 | Lemari Kaca | 2 | B | - | - |  |
| 25 | Lemari Makan | 1 | B | - | - |  |
| 26 | Alat Pengaman / Sinyal | 1 | B | - | - |  |
| 27 | Papan Nama Instansi | 72 | B | - | - |  |
| 28 | Papan Pengumuman | 170 | B | - | - |  |
| 29 | Alat Kantor Lainnya | 7 | B | - | - |  |
| 30 | Meja Kerja Kayu | 61 | B | - | - |  |
| 31 | Kursi Besi/Metal | 9 | B | - | - |  |
| 32 | Meja Rapat | 15 | B | - | - |  |
| 33 | Meja 1/2 Biro | 1 | B | - | - |  |
| 34 | Kursi Rapat | 3 | B | - | - |  |
| 35 | Kursi Tamu | 1 | B | - | - |  |
| 36 | Kursi Putar | 50 | B | - | - |  |
| 37 | Meja Komputer | 1 | B | - | - |  |
| 38 | Sofa | 5 | B | - | - |  |
| 39 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 5 | B | - | - |  |
| 40 | Alat Pembersih lainnya | 1 | B | - | - |  |
| 41 | Lemari Es | 2 | B | - | - |  |
| 42 | A.C. Window | 31 | B | - | - |  |
| 43 | Kipas Angin | 1 | B | - | - |  |
| 44 | Alat Dapur lainnya | 4 | B | - | - |  |
| 45 | Televisi | 5 | B | - | - |  |
| 46 | Loudspeaker | 2 | B | - | - |  |
| 47 | Sound System | 2 | B | - | - |  |
| 48 | Unit Power Supply | 14 | B | - | - |  |
| 49 | Stabilisator | 3 | B | - | - |  |
| 50 | Camera Video | 2 | B | - | - |  |
| 51 | Tangga Aluminium | 1 | B | - | - |  |
| 52 | Dispenser | 7 | B | - | - |  |
| 53 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 4 | B | - | - |  |
| 54 | Alat Pemadam/Portable | 2 | B | - | - |  |
| 55 | Alat Pembantu Kebakaran | 1 | B | - | - |  |
| 56 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 2 | B | - | - |  |
| 57 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II | 1 | B | - | - |  |
| 58 | Microphone/Wireless MIC | 1 | B | - | - |  |
| 59 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 1 | B | - | - |  |
| 60 | Camera Electronic | 2 | B | - | - |  |
| 61 | Layar Film/Projector | 3 | B | - | - |  |
| 62 | Alat Studio Pemetaan lainnya | 4 | B | - | - |  |
| 63 | Handy Talky (HT) | 1 | B | - | - |  |
| 64 | switcher/menara antena lainnya | 1 | B |  |  |  |
| 65 | Termometer Mercury Untuk Suhu Badan | 902 | B |  |  |  |
| 66 | Generator | 2 | B |  |  |  |

3. Gedung dan Bangunan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JUMLAH | KONDISI | | | KET |
| BAIK | KURANG BAIK | RUSAK |
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1.277,5 | B |  |  |  |
| 2 | Gedung Gudang Tertutup Permanen | 96 | B |  |  |  |
| 3 | Gedung Garasi/Pool Semi Permanen | 120 | B |  |  |  |
| 4 | Rumah Negara Golongan III Type C Semi Permanen | 45 | B |  |  |  |

4. Aset Tetap Lainnya

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JUMLAH | KONDISI | | | KET |
| BAIK | KURANG BAIK | RUSAK |
| 1 | Buku Laporan Lain-lain | 2 | B |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

(Data per 31Desemberi 2020)

**2.3 Kinerja PelayananBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah saat ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah. Adapun sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Penganggaran**

Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. RKA-SKPD yang telah sesuai dengan KUA/PPAS dientry kedalam aplikasi penganggaran (SIMDA) sebagai bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD yang telah disusun disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

1. **Pelaksanaan**

Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya berdasarkan DPA-SKPD, diterbitkan Sur Penyediaan Dana (SPD) masing-masing kegiatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

**c. Penatausahaan dan Pelaporan**

Berdasarkan SPD, SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya berdasarkan SP2D, SKPD mencairkan dana pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu Bank Kalsel Cabang Marabahan. Secara umum proses penganggaran sampai dengan pelaporan sudah menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

d. **Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah**

Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimilik/dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik, pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa penggunabarang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelolaan barang.

Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelolaan barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran barang daerah.

## **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD**

1. Faktor tantangan yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:
   1. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat dan menuntut penyesuaian daerah untuk implementasinya. Disamping Peraturan Pengelolaan Keuangan, demikian juga dengan Peraturan Pengelolaan Aset Daerah yang diatur tersendiri.
   2. Masih kurangnya kompentensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap SKPD serta jumlah SDMnya. Karena kewenangan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berada di BPKAD sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) tetapi juga di SKPD lainnya, karena itu kinerja BPKAD sangat dipengaruhi oleh kinerja aparat pengelola keuangan yang ada di SKPD lainnya dari mulai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD ) bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan lain-lain;
   3. Kurangnya kesempatan atau pemanfaatan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi bagi pengelola keuangan dan asset daerah. Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka peningkatan pendidikan formal / informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi
   4. Belum terselesaikannya permasalahan aset pemerintah daerah;
   5. Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional.
2. Faktor peluang yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:
   1. Tersedianya sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.
   2. Adanya pelimpahan kewenangan yang diatur Undang-Undang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD ) dan BUD.
   3. Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan pihak swasta.
   4. Harmonisasinya hubungan antara atasan dan bawahan serta antar SKPD serta kemudahan koordinasi dengan pihak propinsi dan pemerintah pusat.

Tabel 2.8.

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD

Kabupaten Barito Kuala

(Tabel T-C 23)



Dari table 2.8 di atas bahwa indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ada 2 yaitu Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar, dan Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar. Dari target renstra, realisasi dan rasio capaian Nampak terlihat sesuai target yaitu Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar, dan Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar100 Persen.

Dari table tersebut diatas terlihat dari dua indikator yang ditetapkan dapat dicapai atau terealisasi 100 %. Namun hal ini perlu penyempurnaan Karena dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala baik dari internal maupun eksternal. Permasalahan ini apabila tidak dikenali maka akan menghambat dalam peningkatan pengelolaan baik keuangan maupun asset.

**Tabel 2.9**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD BPKAD**

**Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022**

**(Tabel T-C 24)**



Dari table 2.8 terlihat bahwa target dan realisasi tercapai sesuai target, namun apabila dibandingkan dengan table 2.9 maka dari anggaran dan realisasi terlihat bahwa terdapat silpa pada setiap kegiatan. Silpa ini bias dikatakan efisiensi pelaksanaannya jika masih dibawah 10 persen namun jika di atas tersebut maka ada indikasi penyusunan perencanaan anggaran masih kurang maksimal.Dari table tersebut di atas terlihat sebagian besar realisasi masih banyak berada diatas 10 persen, sehingga perlu penyempurnaan perencanaan penganggaran di Renstra yang akan datang. Rasio realisasi anggaran dan realisasi masih terlihat dikisaran 60 s.d 90 dan ratio pertumbuhan masih berada dibawah 1 atau masih rendah.

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala.

**3.1.** **Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan aset Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih mengalami banyak kendala dalam pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan aset daerah, sehingga belum efektifnya pengelolaan keuangan tersebut, belum efektif dan efisiennya pengelolaan aset-aset daerah sehingga masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Adapun pengelolaan keuangan dan aset yang belum efektifnya pengelolaan itu sendiri antara lain :

* 1. Perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  2. Masih adanya Pejabat Pengelola Keuangan SKPD yang kurang memahami tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1. Penyusunan RKA-SKPD yang diajukan tiap-tiap SKPD masih sering terlambat dan tidak tepat waktu.
2. RKA SKPD yang disusun masih banyak yang tidak tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Anggaran kas yang disusun dan disampaikan SKPD sebagai dasar untuk membuat Surat Penyediaan Dana setiap SKPD masih terlambat dan tidak akurat dengan perencanaan.
4. Masih ditemui banyak usulan pergeseran anggaran dalam pelaksanaannya.
5. Masih ditemukan penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Masih ada SKPD yang menyampaikan pertanggungjawaban keuangan yang terlambat.
7. Kurangnya kompentensi SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional.
8. Kurangnya kemampuan SDM dalam implementasi laporan berbasis acrual basis.
9. Inventarisasi
10. Asset belum dilaksanakan secara optimal
11. Pengamanan Aset Belum dilaksanakan secara optimal
    1. **Telaahan Visi, Misi**

Sesuai Inmendagri No. 70 Tahun 2021 dimana Kab. Barito Kuala tidak Menyusun RPJMD sehubungan dengan berakhirnya jabatan Bupati pada November 2022 dan Pilkada dilaksanakan Tahun 2024. Didalam peraturan tersebut diatur untuk daerah Menyusun Rencana pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026 yang ditetapkan dengan peraturan bupati. RPD memuat visi misi yang disesuaikan dengan RPJPD Kab. Barito Kuala. Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang RPJPD Thun 2005– 2025, maka telah ditetapkan visi “**Terwujudnya Barito Kuala Yang Adil, Maju dan Mandiri Berbasis Agribisnis**” yang dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan local dengan mengoptimalkan pengelolaan SDA dan sumberdaya lainnya untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan
2. Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan prasarana dan sarana pembangunan
3. Memantapkan tata Kelola kepemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Mengembangkan dan meningkatkankualitas SDM berlandaskan IPTEK dan IMTAQ

Mengingat eratnya kaitan antara Rancangan Renstra BPKAD Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPD 2023-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BPKAD Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BPKAD yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPD.

1. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, maka BPKAD berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Visi dan Misi dalam RPD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yaitu “Memantapkan tata Kelola kepemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah “.

**3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan dan lembaga.**

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan pada dasarnya merupakan pedoman dalam penyusunan Sasaran Strategi dan Program APBN yang di kelompokkan dalam enam tema-Pendapatan Negara, Belanja Negara, Perbendaharaan Negara, Pembiayaan APBN, Kekayaan Negara, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank. Untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategi dan Program yang dibagi dalam lima tema tersebut, disusun Sasaran Strategi dan Program Kementerian Keuangan lainnya yang pada hakekatnya merupakan pilar-pilar Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan yang menyangkut-Penataan Organisasi, Penyempurnaan Proses Bisnis, dan Pengembangan SDM, serta pengembangan Informasi dan Teknologi.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah **‘Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong’.**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
6. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
7. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
8. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
9. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
10. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita Kedua.

Untuk kurun waktu 2020-2024, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara, optimalisasi pengelolaan risiko pembiayan/utang dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita kedua), serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut salah satunya adalah terkait dengan Nawa Cita kedua Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah- Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan. Salah satu pointpentng adalah Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah. Arah kebijakan Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah dilakukan melalui strategi:1) Meningkatkan kemampuan fiskal daerah;2) Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah; dan3) Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud, akan dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas yaitu: (1) Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Dana Perimbangan, DJPK; (2) Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, DJPK; dan (3) Kegiatan Perumusan Kebijakan, dan Pembinaan Di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK.

## Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Barito Kuala.Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala tidak terkait erat / secara langsung dengan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 sehingga tidak ada penjelasan lebih lanjut.

* 1. Penentuan Isu-Isu Stategis.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka BPKAD Kabupaten Barito Kuala dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPD Kabupaten Barito Kuala.

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis lembaga/institusi BPKAD Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang, maka berikut ini isu strategis pembangunan Barito Kuala 2023-2026 adalah “ **Belum optimalnya tata kelola keuangan dan BMD** “ dengan rumusan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dibidang pengelolaan keuangandan asset daerah.
2. Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
3. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat yang perlu didukung kemampuan implementasinya bagi daerah.
4. Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan dinamika yang berkembang.
5. Belum terintgrasinya perencanaan dan penganggaran, sehingga menghambat dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan APBD.
6. Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka peningkatan pendidikan formal / informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangandan asset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relative tinggi.
7. Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional.
8. Mempunyai kewenangan dalam hal melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
9. Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.
10. Melaksanakanpembinaankepada SKPD melaluif ungsi evaluasi perencanaan anggaran dan pengolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
11. Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi dengan tingkat provinsi dan pusat.
12. Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.
13. Adanya pola pikir /mind set ego sektoral dalam memahami dan melaksanakan tupoksi.
14. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
15. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Barito**

**Kuala**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Rencana Pembangunan Daerah tahun yaitu tahun 2023 sampai dengan 2026.

Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan RPD Kab. Barito Kuala 2023 – 2026.

Visi : “Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang Transparan dan Akuntabel”

**Misi :**

1. **Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**
2. **Mengoptimalkan tata kelola barang milik daerah**
3. **Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Aparatur dibidang keuangan dan Aset Daerah**

Sehubungan dengan hal di atas, maka BPKAD Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan tugas dan fungsinya selanjutnya merumuskan beberapa tujuan, yang mana tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan guna dapat memecahkan masalah dan menangani isu strategis yang ada.

Selanjutnya, tujuan yang dimaksud adalah :

**“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten “ dengan Indikator “OPINI BPK (WTP)”**

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran SKPD dimana sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau semesteran.

Selanjutnya, sasaran yang ditetapkan oleh SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

**“Meningkatnya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah yang akuntabel”, dan” Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD”**

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan asset daerah Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

(Tabel TC 25)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Indikator | Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator | Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemkab | OPINI BPK | WTP | Meningkatnya pengelolaan keuangan dan bmd yang Akuntabel | Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Cara Perhitungan Indikator : Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP/Jumlah total OPD yang wajib menyusun laporan keuangan x 100 | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Persentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku | Cara Perhitungan Indikator :  JumlahOPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku/Jumlah total OPD yang wajib menyusun laporan BMD x 100 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 |  | Nilai SAKIP | Nilai berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat atas LKIP SKPD | Meningkat  nya akuntabilitas kinerja SKPD | Nilai evaluasi SAKIP SKPD | Nilai berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat atas LKIP SKPD | 89,26 | 90,26 | 91,26 | 92,26 | 92,26 |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi dalam arti dapat menjadi instrumen monitoring dan evaluasi pembangunan. Adapun strategi pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat diformulasi berdasarkan pada matrik analisis SWOT berikut ini:

**Matrik Analisis SWOT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Internal***  ***Eksternal*** | | **S** | **W** |
| Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan keuangan dan Aset daerah | Kurangnya kemampuan dan kualitas serta jumlah SDM pengelola keuangan dan aset |
| Kewenangan selaku satuan kerja pengelola keuangan daerah | Belum optimalnya pemanfaatan diklat dan pelatihan  Rendahnya monitoring dan evaluasi |
| Kepercayaan pimpinan dan kemudahan koordinasi baik ditingkat SKPD, Propinsi dan pusat. |
| **O** | Tersedianya Pendidikan dan pelatihan serta sarana peningkatan kualitas administrasi lainnya | **“Optimalisasi sistem dan manajemen pelayanan organisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi”** | **“Peningkatan kemampuan sdm dan jumlah pengelola keuangan dan asset melalui diklat dan rekruitmen serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap SKPD”** |
| Hubungan yang harmonis dengan SKPD |
| Tersedianya informasi teknologi |
| **T** | Kurangnya kemampuan dan kualitas SDM pengelola keuangan dan aset | **“Peningkatan kinerja dan profesionalisme dengan memanfaatkan aturan dan kewenangan guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel”** | **“Pemanfaatan diklat, dan saranalainnya untuk mewujudkan profesionalis meterhadap pengelolaan keuangan dan aset** |
| Dinamika pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan |
| Inkosistensi kebijakan pemerintah |

Berdasarkan pada analisis tersebut, maka dapat dirincikan strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut (Dalam hal ini strategi merupakan “St”):

1. Optimalisasi sistem dan manajemen pelayanan organisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan jumlah pengelola keuangan dan asset melalui Diklat dan rekruitmen serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap SKPD
3. Peningkatan kinerjadan profesionalisme dengan memanfaatkan aturan dan kewenangan guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel
4. Pemanfaatan diklat, dan sarana lainnya untuk mewujudkan profesionalisme terhadap pengelolaan keuangan dan aset

Merujuk pada strategi-strategi tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan pembangunan dengan berdasarkan pada *balanced scorecard* melalui empat perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan. Adapun definisi masing masing tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

* 1. Kebijakan pada perspektif pelayanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
  2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
  3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya peningkatankapasitaskinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
  4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Menjamin tersedianya sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.
3. Meningkatkan kompetensi dan jumlah sumber daya manusia guna mendukung profesionalisme dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah.
4. Menjamin terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku memperhatikan dinamika perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro.
5. Peningkatan penatausahaan, pemanfaatan aset daerah melalui pengelolaan aset-aset pemerintah daerah.

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

**(Tabel T-C 26)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Visi BPKAD :  MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL,TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL | | | |
| Misi Kabupaten:  Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani  Misi BPKAD :   1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 2. Mengoptimalkan tata kelola Barang Milik Daerah 3. Meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) aparatur di bidang keuangan dan asset/barang daerah | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemkab | Meningkatnya pengelolaan keuangan dan bmd yang Akuntabel | Peningkatan tata kelola keuangan dan BMD | Mengembangkan manajemen pengelolaan keuangan dan BMD |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai aksidalam pemenuhan tujuanorganisasi.

Renstra BPKAD Kabupaten Barito Kuala disusun dengan mengacu pada RPD Kabupaten Barito Kuala 2023-2026, dimana didalamnya disebutkan bahwa **Visi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala** dalam empat tahun kedepan adalah **“Terwujudnya Barito Kuala Yang Adil, Maju dan Mandiri Berbasis Agribisnis”**, hal ini ditindaklanjuti dengan melaksanakan empat misi pembangunan dimana peran BPKAD berada dalam **Misi ke-3 dari RPD yakni “Memantapkan tata Kelola kepemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah”**. Untuk mewujudkan misi tersebut maka Tujuan dan sasaran dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala diselaraskan dengan Misi ke 3 RPD yakni “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemkab”,** disertai dengan sasaran Renstranya yakni

1. “**Meningkatnya pengelolaan keuangan dan BMD yang Akuntabel”** dengan Indikator Sasaran yakni **:**

* Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP
* Persentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku

**2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD dengan Indikator Sasaran yakni :**

**-** Nilai evaluasi SAKIP SKPD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Barito Kuala merupakan program prioritas RPD Kabupaten Barito Kuala yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu anggaran dalam RPD selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BPKAD Kabupaten Barito kuala. Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi outcome program.

Dalam urusan pemerintah fungsi penunjang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Barito Kuala maka program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023-2026 adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam RPD Kabupaten Barito Kuala. Selain itu dilaksanakan pula program-penunjang lainnya yang dapat dijabarkan dalam tabel Tabel 6.1 di bawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Tabel6.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Rencana,Program,Kegiatan,dan pendanaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **(Tabel T-C 27)**  **(Sesudah Pemutahiran)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator sasaran** | **Kode** | | | | | **Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **IndikatorKinerja Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan** | **Target Kinerja Program danKerangkaPendanaan** | | | | | | | | | | **unit kerja SKPD penanggungjawab** | **Lokasi** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | | **Kondisi Kinerja pada akhir priode Renstra SKPD** | | | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | | **1** | **2** | **3** | **4** | | | | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **18** | **19** | **20** | **21** | | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemkab** | **Meningkatnya pengelolaan keuangan dan bmd yang akuntabel** | Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP  Persentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku | **5** | **02** | **02** |  |  | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar | **224,628,064,845** | 100% | **224,628,064,845** | 100% | **247,090,871,330** | 100% | **271,845,140,462** | 100% | **299,029,654,509** | 100% | **1,042,593,731,146** | BPKAD |  | | **5** | **02** | **02** | **201** |  | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun tepat waktu | **1,187,030,570** | 100% | **1,187,030,570** | 100% | **1,305,733,627** | 100% | **1,436,306,990** | 100% | **1,579,937,689** | 100% | **5,509,008,875** | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 201 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (dokumen) | 20,346,000 | 2 | 20,346,000 | 2 | 22,380,600 | 2 | 24,618,660 | 2 | 27,080,526 | 8 | 94,425,786 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 201 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (dokumen) | 23,145,330 | 2 | 23,145,330 | 2 | 25,459,863 | 2 | 28,005,849 | 2 | 30,806,434 | 8 | 107,417,477 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 201 | 03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (dokumen) | 91,577,640 | 47 | 91,577,640 | 47 | 100,735,404 | 47 | 110,808,944 | 47 | 121,889,839 | 188 | 425,011,827 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 201 | 04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (dokumen) | 19,768,700 | 47 | 19,768,700 | 47 | 21,745,570 | 47 | 23,920,127 | 47 | 26,312,140 | 188 | 91,746,537 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 201 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (dokumen) | 593,725,260 | 2 | 593,725,260 | 2 | 653,097,786 | 2 | 718,407,565 | 2 | 790,248,321 | 8 | 2,755,478,932 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 201 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (dokumen) | 438,467,640 | 2 | 438,467,640 | 2 | 482,314,404 | 2 | 530,545,844 | 2 | 583,600,429 | 8 | 2,034,928,317 | BPKAD |  | | **5** | **02** | **02** | **202** |  | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **Persentase Dokumen penatausahaan keuangan daerah yang disusun sesuai aturan yang berlaku** | **609,092,560** | 100% | **609,092,560** | 100% | **670,001,816** | 100% | **737,001,998** | 100% | **810,702,197** | 100% | **2,826,798,571** | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 202 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (dokumen) | 99,742,070 | 1 | 99,742,070 | 1 | 109,716,277 | 1 | 120,687,905 | 1 | 132,756,695 | 4 | 462,902,947 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 202 | 03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (dokumen) | 41,942,000 | 4 | 41,942,000 | 4 | 46,136,200 | 4 | 50,749,820 | 4 | 55,824,802 | 16 | 194,652,822 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 202 | 04 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (dokumen) | 22,388,700 | 1 | 22,388,700 | 1 | 24,627,570 | 1 | 27,090,327 | 1 | 29,799,360 | 4 | 103,905,957 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 202 | 05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (dokumen) | 158,427,220 | 7 | 158,427,220 | 7 | 174,269,942 | 7 | 191,696,936 | 7 | 210,866,630 | 28 | 735,260,728 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 202 | 06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (dokumen) | 77,301,100 | 2 | 77,301,100 | 2 | 85,031,210 | 2 | 93,534,331 | 2 | 102,887,764 | 8 | 358,754,405 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 202 | 09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (dokumen) | 48,792,070 | 3 | 48,792,070 | 3 | 53,671,277 | 3 | 59,038,405 | 3 | 64,942,245 | 12 | 226,443,997 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 202 | 10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (dokumen) | 91,665,700 | 3 | 91,665,700 | 3 | 100,832,270 | 3 | 110,915,497 | 3 | 122,007,047 | 12 | 425,420,514 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 202 | 11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (orang) | 68,833,700 | 564 | 68,833,700 | 564 | 75,717,070 | 564 | 83,288,777 | 564 | 91,617,655 | 2256 | 319,457,202 | BPKAD |  | | **5** | **02** | **02** | **203** |  | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **Persentase Dokumen pertanggungjawaban APBD yang disusun tepat waktu** | **615,732,240** | 100% | **615,732,240** | 100% | **677,305,464** | 100% | **790,218,010** | 100% | **869,239,811** | 100% | **2,952,495,526** | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 203 | 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan) | 123,965,650 | 2 | 123,965,650 | 2 | 136,362,215 | 2 | 149,998,437 | 2 | 164,998,280 | 8 | 575,324,582 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 203 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (dokumen) | 342,398,840 | **2** | 342,398,840 | 2 | 376,638,724 | 2 | 414,302,596 | 2 | 455,732,856 | 8 | 1,589,073,016 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 203 | 07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (dokumen) | 11,423,250 | 1 | 11,423,250 | 1 | 12,565,575 | 1 | 13,822,133 | 1 | 15,204,346 | 4 | 53,015,303 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 203 | 09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (dokumen) | 37,340,500 | 1 | 37,340,500 | 1 | 41,074,550 | 1 | 45,182,005 | 1 | 49,700,206 | 4 | 173,297,261 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 203 | 10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (dokumen) | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 45,182,000 | 1 | 49,700,200 | 4 | 94,882,200 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 203 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 100,604,000 | 94 | 100,604,000 | 94 | 110,664,400 | 94 | 121,730,840 | 94 | 133,903,924 | 376 | 466,903,164 | BPKAD |  | | **5** | **02** | **02** | **204** |  | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Persentase Dokumen penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah yang disusun sesuai peraturan yang berlaku** | **222,216,209,475** | 100% | **222,216,209,475** | 100% | **244,437,830,423** | 100% | **268,881,613,465** | 100% | **295,769,774,811** | 100% | 1,031,305,428,173 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 204 | 08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan) | 214,142,660,300 | 1 | 214,142,660,300 | 1 | 235,556,926,330 | 1 | 259,112,618,963 | 1 | 285,023,880,859 | 4 | 993,836,086,452 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 204 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan) | 5,229,769,375 | 1 | 5,229,769,375 | 1 | 5,752,746,313 | 1 | 6,328,020,944 | 1 | 6,960,823,038 | 4 | 24,271,359,669 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 02 | 204 | 10 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan) | 2,843,779,800 | 1 | 2,843,779,800 | 1 | 3,128,157,780 | 1 | 3,440,973,558 | 1 | 3,785,070,914 | 4 | 13,197,982,052 | BPKAD |  | | **5** | **02** | **03** |  |  | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang benar** | **643,261,230** | 100% | **643,261,230** | 100% | **707,587,353** | 100% | **778,346,088** | 100% | **856,180,697** | 100% | **2,985,375,368** | BPKAD |  | | **5** | **02** | **03** | **201** |  | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **Jumlah SKPD yang mencatat barang milik daerah tepat waktu (SKPD)** | **643,261,230** | 47 | **643,261,230** | 47 | **707,587,353** | 47 | **778,346,088** | 47 | **856,180,697** | 47 | 2,985,375,368 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 03 | 201 | 01 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun (dokumen) | 233,955,225 | 2 | 233,955,225 | 2 | 257,350,748 | 2 | 283,085,822 | 2 | 311,394,404 | 8 | 1,085,786,199 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 03 | 201 | 03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik  Daerah (dokumen) | 13,232,500 | 4 | 13,232,500 | 4 | 14,555,750 | 4 | 16,011,325 | 4 | 17,612,458 | 16 | 61,412,033 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 03 | 201 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik  Daerah (Laporan) | 131,715,330 | 2 | 131,715,330 | 2 | 144,886,863 | 2 | 159,375,549 | 2 | 175,313,104 | 8 | 611,290,847 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 03 | 201 | 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan) | 58,190,750 | 1 | 58,190,750 | 1 | 64,009,825 | 1 | 70,410,808 | 1 | 77,451,888 | 4 | 270,063,271 | BPKAD |  | | 5 | 02 | 03 | 201 | 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (dokumen) | 206,167,425 | 24 | 206,167,425 | 24 | 226,784,168 | 24 | 249,462,584 | 24 | 274,408,843 | 96 | 956,823,019 | BPKAD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BPKAD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BPKAD |  | | **Meningkatnya kualitas laporan keuangan**  **Meningkatnya kualitas laporan Kinerja SKPD** | **X** | **XX** | **01** |  |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Persentase realisasi administrasi Umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan | **4,728,673,925** | 100% | **4,728,673,925** | 100% | **5,250,441,318** | 100% | **5,775,485,449** | 100% | **6,353,033,994** | 100% | **22,107,634,686** | BPKAD |  | | **X** | **XX** | **01** | **201** |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase realisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi | **3,793,920** | 100% | **3,793,920** | 100% | **4,173,312** | 100% | **4,590,643** | 100% | **5,049,708** | 100% | **17,607,583** | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 201 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen) | 3,793,920 | 9 | 3,793,920 | 9 | 4,173,312 | 9 | 4,590,643 |  | 5,049,708 | 27 | 17,607,583 | BPKAD |  | | **X** | **XX** | **01** | **202** |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase realisasi Administrasi keuangan | **3,838,778,511** | 100% | **3,838,778,511** | 100% | **4,222,656,362** | 100% | **4,644,921,998** | 100% | **5,109,414,198** | 100% | **17,815,771,070** | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 202 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (bulan) | 3,836,803,881 | 14 | 3,836,803,881 |  | 4,220,484,269 |  | 4,642,532,696 |  | 5,106,785,966 | 14 | 17,806,606,812 | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 202 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1,974,630 | 1 | 1,974,630 |  | 2,172,093 |  | 2,389,302 |  | 2,628,233 | 1 | 9,164,258 | BPKAD |  | | **X** | **XX** | **01** | **205** |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase realisasi administrasi kepegawaian | **149,604,200** | 100% | **149,604,200** | 100% | **164,564,620** | 100% | **181,021,082** | 100% | **199,123,190** | 100% |  | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 205 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang) | 68,383,600 | 8 | 68,383,600 | 8 | 75,221,960 | 8 | 82,744,156 | 8 | 91,018,572 | 32 | 317,368,288 | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 205 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang) | 32,498,200 | 5 | 32,498,200 | 5 | 35,748,020 | 5 | 39,322,822 | 5 | 43,255,104 | 20 | 150,824,146 | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 205 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang) | 48,722,400 | 4 | 48,722,400 | 4 | 53,594,640 | 4 | 58,954,104 | 4 | 64,849,514 | 16 | 226,120,658 | BPKAD |  | | **X** | **XX** | **01** | **206** |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor** | **309,923,665** | 100% | **309,923,665** | 100% | **340,916,032** | 100% | **375,007,635** | 100% | **412,508,398** | 100% | **1,438,355,729** | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 206 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 2,527,955 | 3 | 2,527,955 | 3 | 2,780,751 | 3 | 3,058,826 | 3 | 3,364,708 | 12 | 11,732,239 | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 206 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 51,559,190 | 39 | 51,559,190 | 39 | 56,715,109 | 39 | 62,386,620 | 39 | 68,625,282 | 156 | 239,286,201 | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 206 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 67,250,000 | 12,366 | 67,250,000 | 12,366 | 73,975,000 | 12,366 | 81,372,500 | 12,366 | 89,509,750 | 49464 | 312,107,250 | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 206 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 30,784,370 | 6 | 30,784,370 | 6 | 33,862,807 | 6 | 37,249,088 | 6 | 40,973,996 | 24 | 142,870,261 | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 206 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen) | 11,500,000 | 8 | 11,500,000 | 8 | 12,650,000 | 8 | 13,915,000 | 8 | 15,306,500 | 32 | 53,371,500 | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 206 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 146,302,150 | 41 | 146,302,150 | 41 | 160,932,365 | 41 | 177,025,602 | 41 | 194,728,162 | 164 | 678,988,278 | BPKAD |  | | **X** | **XX** | **01** | **207** |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase realisasi Pengadaan barang milik daerah | **69,927,000** | 100% | **69,927,000** | 100% | **125,819,700** | 100% | **138,401,670** | 100% | **152,241,837** | 100% | **486,390,207** | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 207 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) |  | 2 |  | 2 | 45,200,000 | 2 | 49,720,000 | 2 | 54,692,000 | 8 | 149,612,000 | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 207 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket) |  | 2 |  | 2 | 3,700,000 | 2 | 4,070,000 | 2 | 4,477,000 | 8 | 12,247,000 | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 207 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit) | 69,927,000 | 5 | 69,927,000 | 5 | 76,919,700 | 5 | 84,611,670 | 5 | 93,072,837 | 20 | 324,531,207 | BPKAD |  | | **X** | **XX** | **01** | **208** |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemda | **190,407,129** | 100% | **190,407,129** | 100% | **209,447,842** | 100% | **230,392,626** | 100% | **253,431,889** | 100% | **883,679,486** | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 208 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 29,786,000 | 1200 | 29,786,000 | 1200 | 32,764,600 | 1200 | 36,041,060 | 1200 | 39,645,166 | 4800 | 138,236,826 | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 208 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 124,800,000 | 12 | 124,800,000 | 12 | 137,280,000 | 12 | 151,008,000 | 12 | 166,108,800 | 48 | 579,196,800 | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 208 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 35,821,129 | 14 | 35,821,129 | 14 | 39,403,242 | 14 | 43,343,566 | 14 | 47,677,923 | 56 | 166,245,860 | BPKAD |  | | **X** | **XX** | **01** | **209** |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase barang milik daerah yang terpelihara | **166,239,500** | 100% | **166,239,500** | 100% | **182,863,450** | 100% | **201,149,795** | 100% | **221,264,775** | 100% | **771,517,520** | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 209 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit) | 92,200,000 | 22 | 92,200,000 | 22 | 101,420,000 | 22 | 111,562,000 | 22 | 122,718,200 | 88 | 427,900,200 | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 209 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit) | 49,730,000 | 6 | 49,730,000 | 6 | 54,703,000 | 6 | 60,173,300 | 6 | 66,190,630 | 24 | 230,796,930 | BPKAD |  | | X | XX | 01 | 209 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 24,309,500.00 | 1 | 24,309,500.00 | 1 | 26,740,450 | 1 | 29,414,495 | 1 | 32,355,945 | 4 | 112,820,390 | BPKAD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Jumlah** | **230,000,000,000** |  | **230,000,000,000** |  | **253,048,900,000** |  | **278,398,972,000** |  | **306,238,869,200** |  | **1,067,686,741,200** |  |  | |

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Penyusunan indikator kinerja pada Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD ini dalam empat tahun mendatang. Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, Sasaran RPD Kabupaten Barito Kuala yang menjadi acuan pelaksanaan Rancangan rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala yaitu **Meningkatnya pengelolaan keuangan dan BMD yang Akuntabel**. Indikator kinerja yang diidentifikasi adalah indikator sasaran SKPD yang memiliki korelasi langsung dengan RPD. Indikator sasaran SKPD ini pula yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Periode 2023-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan**

**RPD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator** | **Kondisi Kinerja pada awal periode RPD** | **Target Capaian Setiap Tahun** | | | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD** |
| **Tahun 2022** | **Tahun 2023** | **Tahun 2024** | **Tahun 2025** | **Tahun 2026** |  |
| **-1** | **-2** | **-3** | **-4** | **-5** | **-6** | **-7** | **-8** |
| **1** | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
|

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Sasaran**

**RPD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator** | **Kondisi Kinerja pada awal periode RPD** | **Target Capaian Setiap Tahun** | | | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD** |
| **Tahun 2022** | **Tahun 2023** | **Tahun 2024** | **Tahun 2025** | **Tahun 2026** |  |
| **-1** | **-2** | **-3** | **-4** | **-5** | **-6** | **-7** | **-8** |
| **1** | Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat Waktu dan sesuai SAP | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **100 %** |
|
| **2** | Persentase OPD yang menyusun laporan BMD tepat waktu dan sesuai Peraturan yang berlaku | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **100 %** |
| **3** | Nilai evaluasi SAKIP SKPD | **88.26** | **89.26** | **90.26** | **65** | **71** | **71** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 7.2** | | | | | | | | |
| **Penetapan Indikator Kinerja Daerah** | | | | | | | | |
| **Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan** | | | | | | | | |
| **Kabupaten Barito Kuala** | | | | | | | | |
| **NO** | **ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH** | **Kondisi Kinerja pada awal periode RPD** | **Target** | | | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD** | **SKPD** | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | |
| 1. | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | 477.01 | 477.01 | 477.01 | 477.01 | 477.01 | 477.01 | BPKAD | |
| 2. | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | 232.48 | 232.48 | 232.48 | 232.48 | 232.48 | 232.48 | BPKAD | |
| 3. | Manajemen Aset | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BPKAD | |
| 4. | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | BPKAD | |

**BAB VIII**

**PENUTU****P**

Demikianlah telah disajikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 2023-2026 yang merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk 4 (empat) tahun ke depan periode 2023-2026. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada perubahan organisasi baru, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan.Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian tujuan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala periode 2023-2026, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Kedepan sangat mungkin diperlukan saran dan masukan terkait penyusunan Renstra ini guna penyempurnaan kearah yang lebih baik.

Marabahan,16 Desember 2023

Kepala BPKAD Kab. Barito Kuala

WIWIEN MASRURI, SST,P, M.Si

NIP 19830316 200112 1 001